

RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2013

PENDAHULUAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen pembangunan yang disusun untuk kurun waktu satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), RKPD menjadi Pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) - SKPD dan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-SKPD. RKPD juga menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

VISI PEMBANGUNAN

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kerangka besar itulah, visi, misi dan program kerja walikota terpilih untuk lima tahun ke depan merupakan tahap kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025, diarahkan untuk membawa masyarakat Kota Yogyakarta menuju suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera, berakhlak, bermartabat, berkarakter dan bermakna. Maka visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016 adalah :

***“Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas,
berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan
Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan”***

Visi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 ini menjadi arah cita cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kota Yogyakarta. Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

- Pendidikan berkualitas
 - Penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta harus memiliki kualitas yang berstandar internasional.
 - Memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu dan teknologi.

- Mampu menciptakan manusia Indonesia seutuhnya yaitu keseimbangan antara kecerdasan inteligensia (Intelligensia Quotient), emosional (Emotional Quotient), spiritual (Spiritual Quotient) dan kebugaran dan kesehatan fisik (kinestetik).
- Dikembangkan dengan dukungan sistem kebijakan pendidikan yang unggul.
- Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

- Pendidikan berkarakter
 - Mengembangkan potensi kalbu/ nurani/ afektif peserta didik sebagai manusia dan warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dalam sistem yang berakar pada budaya lokal dan menghormati kemajemukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Bhineka Tunggal Ika).
 - Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius.
 - Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa.
 - Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan.
 - Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreatifitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan.

- Pendidikan inklusif
 - Sistem pendidikan yang mengembangkan kreatifitas dengan memberikan akses kepada semua orang dalam satu sistem yang mencakup sekolah, program nonformal/informal, pendidikan keluarga dan masyarakat serta melibatkan seluruh masyarakat secara penuh.
 - Merupakan sebuah proses dan tujuan yang menggambarkan kualitas atau karakteristik pendidikan untuk semua.
 - Mengembangkan sistem pendidikan formal, non formal dan in formal, dengan merespon keberagaman, mengidentifikasi hambatan belajar yang dihadapi individu maupun kelompok anak.
 - Pendidikan inklusif bukan hanya menyangkut metode dan sistem, tetapi menyangkut nilai-nilai dan keyakinan mendasar tentang pentingnya menghargai dan menghormati perbedaan, tidak mendiskriminasi, dan berkolaborasi dengan orang lain untuk menciptakan dunia yang lebih adil.

- Pariwisata berbasis budaya
 - Kegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta dikembangkan dengan dasar dan berpusat pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat maupun Kadipaten Pakualaman, kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
 - Menyempurnakan dan meningkatkan jaringan kerjasama wisata dengan pihak lain.
 - Menjadikan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara.

- Peningkatan kegiatan pariwisata dilaksanakan dengan menciptakan inovasi-inovasi yang tetap berlandaskan pada wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan, wisata konvensi dan wisata belanja.
 - Kota Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi dan komunikasi harus dibangun lebih maju dan mampu mandiri.
 - Memberikan kontribusi dan dominasi yang lebih besar dari daerah lain di Indonesia.
- Pusat pelayanan jasa
 - Kota Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi dan komunikasi harus dibangun lebih maju dan mampu mandiri.
 - Memberikan kontribusi dan dominasi yang lebih besar dari daerah lain di Indonesia.
 - Peningkatan kegiatan pelayanan jasa dilakukan dengan memperkuat perekonomian kota pada sektor andalan menuju keunggulan kompetitif.
 - Membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan, dengan tetap mempertahankan dan mengembangkan industri kecil dan menengah.
- Berwawasan lingkungan
 - Upaya sadar, terencana dan berkelanjutan.
 - Memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, sosial, budaya dan kearifan lokal ke dalam proses pembangunan.
 - Menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
- Ekonomi kerakyatan
 - Mendorong dan memfasilitasi berjalannya ekonomi kerakyatan yang berkualitas, berkelanjutan, berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota Yogyakarta.
 - Ekonomi kerakyatan yang dimaksud adalah perekonomian yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi daerah dengan kinerja ekonomi.
 - Ekonomi daerah akan tumbuh dan berkembang, berbasis pada ekonomi rakyat dan mampu memberikan dampak nyata kepada rakyat.

MISI PEMBANGUNAN

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016 tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan beserta pokok pokok penjelasannya sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
 - Memperkuat tata kelola pemerintahan Kota Yogyakarta yang baik, bersih, berkeadilan, demokratis, dan berlandaskan hukum
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas
 - Mewujudkan pendidikan untuk semua (inklusif)
 - Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat

- Memperkuat pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan aksesibel bagi seluruh warga Yogyakarta termasuk warga yang mempunyai perbedaan kemampuan (difabel)
3. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto
 - Mengembangkan ekonomi kerakyatan
 - Memperkuat masyarakat Kota Yogyakarta yang toleran, inklusif, bermoral, beretika, beradab dan berbudaya
 - Memasyarakatkan dan membudayakan gerakan Segoro Amarto
 4. Mewujudkan daya saing daerah yang kuat
 - Memperkuat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan inklusif
 - Memperkuat dan mengembangkan keterpaduan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan
 - Memperkuat daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa
 - Memperkuat Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan
 - Memperkuat Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan pada visi dan misi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2012–2016, maka disusun tujuan pembangunan selama lima tahun ke depan sebagai berikut sebagaimana sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan sasaran:
 - Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
 - Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
 - Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua
 - Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
 - Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai
 - Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto dalam rangka penanggulangan kemiskinan
 - Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat
 - Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat
4. Memperkuat daya saing daerah untuk memajukan kota Yogyakarta
 - Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul
 - Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat
 - Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha

PRIORITAS PEMBANGUNAN

Visi, misi dan sasaran pokok tersebut menjadi acuan dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah. Selain itu dalam merumuskan prioritas pembangunan juga melihat pada prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan juga prioritas dan sasaran Propinsi

DIY, pencapaian MDGs, Standar Pelayanan Minimal, target pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur serta reformasi birokrasi dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu, penyusunan RKPD perlu memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah nasional maupun propinsi. Sehingga untuk mensinergikan rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional maka perlu memperhatikan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, yaitu terdapat 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Nasional dan 3 (tiga) Prioritas Lainnya yaitu:

1. Prioritas 1, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Prioritas ini diarahkan untuk memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, akuntabel, taat kepada hukum, transparan.
2. Prioritas 2, Pendidikan, prioritas pembangunan pendidikan untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju kesejahteraan rakyat, kemandirian, keluruhan budi pekerti, karakter bangsa yang kuat, serta kewirausahaan.
3. Prioritas 3, Kesehatan, penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dan pencapaian keseluruhan sasaran Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015.
4. Prioritas 4, Penanggulangan Kemiskinan, prioritas ini dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan yang pro rakyat.
5. Prioritas 5, Ketahanan Pangan, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat merupakan pondasi dasar pembangunan dan ketahanan nasional.
6. Prioritas 6, Infrastruktur Prioritas ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan sarana dan prasana infrastruktur sesuai SPM, mendukung peningkatan daya saing sektor riil dan meningkatkan kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) dalam penyediaan infrastruktur.
7. Prioritas 7, Iklim Investasi dan Iklim Usaha, peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
8. Prioritas 8, Energi Pembangunan, ketahanan dan kemandirian energi diarahkan untuk mencapai bauran energi yang dapat menjamin kelangsungan pasokan energi di seluruh wilayah Indonesia, penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT).
9. Prioritas 9, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, prioritas ini menekankan pada upaya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan serta pengendalian kerusakan lingkungan secara keseluruhan.
10. Prioritas 10, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar & Pasca Konflik, prioritas ini dimaksudkan untuk menurunkan tingkat kesenjangan antarwilayah yang ditunjukkan dengan masih tingginya jumlah kabupaten tertinggal serta masih beragamnya permasalahan keterisolasian daerah perbatasan dan pulau terluar.
11. Prioritas 11, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi, prioritas pembangunan kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi dimaksudkan dalam rangka pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni.

Adapun 3 (tiga) prioritas lainnya, yaitu:

1. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Prioritas ini diarahkan untuk memantapkan kondisi aman dan damai, pencegahan tindak terorisme melalui upaya deradikalisasi.
2. Bidang Perekonomian, pelaksanaan prioritas ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses produk nasional ke pasar luar negeri, akses dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, serta mendorong revitalisasi industri khususnya industri berbasis sumberdaya alam, terutama pertanian.
3. Bidang Kesejahteraan Rakyat, dimaksudkan untuk pembangunan bidang kepariwisataan, agama, pemuda dan olahraga, serta pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Adapun prioritas pembangunan Propinsi DIY untuk Tahun 2009-2014 adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kesehatan
3. Pariwisata
4. Ketahanan pangan dan agro industri
5. Iklim investasi dan usaha
6. Infrastruktur
7. Penanggulangan kemiskinan
8. Lingkungan hidup dan mitigasi bencana
9. Reformasi birokrasi
10. Pengarusutamaan gender

Adapun prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2013 lebih ditekankan pada:

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan kemiskinan
5. Sarana dan prasana infrastruktur
6. Lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana
7. Pariwisata berbasis budaya
8. Pelayanan jasa dan iklim investasi/usaha

Berdasarkan prioritas pembangunan Tahun 2013, maka Belanja Daerah digunakan untuk penyelesaian prioritas-prioritas tersebut tanpa mengabaikan pelayanan dasar yang wajib diterima oleh masyarakat.

PERKIRAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2013

URAIAN	JUMLAH (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	953.441.000.000
PENDAPATAN ASLI DAERAH	264.602.000.000
Pajak Daerah	144.350.000.000
Retribusi Daerah	37.385.000.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.847.000.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	72.020.000.000
DANA PERIMBANGAN	594.877.000.000
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	32.824.000.000
Dana Alokasi Umum	555.243.000.000
Dana Alokasi Khusus	6.810.000.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	93.962.000.000
Hibah	-
Dana Darurat	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	58.962.000.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	25.000.000.000
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	10.000.000.000
BELANJA DAERAH	995.942.000.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG	573.192.000.000
Belanja Pegawai	522.228.000.000
Belanja Bunga	76.000.000
Belanja Subsidi	
Belanja Hibah	12.111.000.000
Belanja Bantuan Sosial	31.777.000.000
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	
Bantuan Keuangan kepada Parpol	3.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000
BELANJA LANGSUNG	422.750.000.000
Belanja Pegawai	
Belanja Barang dan Jasa	
Belanja Modal	
SURPLUS / (DEFISIT)	(42.501.000.000)
PEMBIAYAAN DAERAH	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	47.863.000.000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	47.663.000.000
Pencairan Dana Cadangan	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-
Penerimaan Piutang Daerah	200.000.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.362.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000
Pembayaran Pokok Utang	362.000.000
Pemberian Pinjaman Daerah	-
PEMBIAYAAN NETTO	42.501.000.000
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-